

PENDIDIKAN DI INDONESIA DALAM HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI)

YULIANI^{*)}

**)Dosen STKIP PGRI Tulungagung*

ABSTRAK

Human Development Index (HDI) merupakan ukuran ringkasan untuk menilai kemajuan jangka panjang dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, antara lain harapan hidup dan kesehatan, akses terhadap pengetahuan atau pendidikan dan standar hidup yang layak. Dengan informasi angka dan peringkat HDI (Human Development Index) dapat diperoleh gambaran keadaan kesejahteraan masyarakat yang diukur diukur dari beberapa aspek, yaitu: 1) Life expectancy at birth (harapan hidup saat lahir) aspek ini digunakan sebagai tolok ukur kualitas kesehatan; 2) Expected years of schooling (Harapan Lama Sekolah) aspek ini sebagai tolok ukur pendidikan; 3) Mean years of schooling (Rerata Partisipasi Sekolah) aspek ini sebagai tolok ukur pemerataan pendidikan; dan 4) Gross National Income (Pendapatan Nasional Bruto) aspek ini jelas mengukur tentang taraf ekonomi masyarakat. Human Development Index (HDI) dapat mencerminkan bagaimana posisi sebuah negara dengan negara lain dalam tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu pembangunan manusianya termasuk di dalamnya pembangunan di bidang pendidikan. Nilai Human Development Index (HDI) Indonesia 2014 adalah 0.684 yang menempatkan pembangunan manusia Indonesia pada posisi 110 dari 188 negara di dunia. Antara tahun 1980 dan 2014, nilai Human Development Index (HDI) Indonesia meningkat 0,474-0,684, meningkat 44,3% atau peningkatan tahunan rata-rata sekitar 1,08%.

Kata Kunci: Pendidikan, Human Developing Index

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pembangunan dalam keterkaitannya dengan pengembangan sumberdaya manusia yang berarti bahwa pembangunan adalah tidak semata-mata pembangunan material dan fisik tetapi yang pembangunan spiritual yaitu pembangunan manusia yang menjadi tugas utama pendidikan.

Keberhasilan pembangunan dapat tercermin dari sisi ekonomi atau material dan juga sisi spiritual yang terlihat bahwa esensi pembangunan bertumpu dan

berpangkal pada sisi manusianya, dengan demikian yang menjadi tujuan akhir pembangunan adalah manusia. Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia diperlukan pendidikan karena pendidikan merupakan kegiatan yang meningkatkan berubahnya kualitas sumberdaya manusia, dan manusia merupakan salah satu modal utama pembangunan. Jadi pendidikan mengarah kedalam diri manusia sehingga menghasilkan sumberdaya tenaga atau modal yang menunjang pembangunan dan hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan, dengan demikian pendidikan dan pembangunan mempunyai keterkaitan yang saling me-



nunjang.

Manusia sebagai modal pembangunan tidak lepas dari pendidikan sehingga pendidikan adalah merupakan salah satu tolak ukur dalam keberhasilan pembangunan dan jika pembangunan dipandang sebagai sistem makro maka pendidikan merupakan sebuah komponen pembangunan dan dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan suatu bangsa sehingga investasi pendidikan diperlukan. Pembangunan selalu menimbulkan pengaruh atau dampak dan pembangunan merupakan suatu proses dan untuk mengukurnya diperlukan indikator sebagai tolak ukur terjadinya pembangunan baik indikator ekonomi maupun indikator non-ekonomi (indikator sosial).

Human Development Index (HDI) merupakan ukuran ringkasan untuk menilai kemajuan jangka panjang dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, antara lain harapan hidup dan kesehatan, akses terhadap pengetahuan atau pendidikan dan standar hidup yang layak. Sebuah harapan hidup dan kesehatan diukur dengan umur panjang serta berbagai indikator kesehatan, tingkat pengetahuan atau pendidikan diukur dengan tahun rata-rata pendidikan yang merupakan rata-rata jumlah tahun pendidikan yang diterima dalam kehidupan; akses pembelajaran dan pengetahuan dengan tahun yang diharapkan untuk anak-anak usia masuk sekolah, yang merupakan jumlah total tahun sekolah anak usia sekolah; dan Standar hidup diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Human Development Index (HDI) juga merupakan salah satu indikator

dalam pembangunan yang dapat digunakan untuk menganalisis perbandingan status pembangunan sosial ekonomi suatu negara dan sekaligus menggambarkan pembangunan manusia di suatu Negara (Soubbotina, Tatyana: 2005).

Dengan informasi angka dan peringkat HDI (*Human Development Index*) dapat diperoleh gambaran keadaan kesejahteraan masyarakat yang diukur dari harapan hidup masyarakat di suatu negara dengan mengukur kesehatan dan nutrisi, pendidikan yang diukur dengan harapan lama sekolah dan rerata partisipasi sekolah, serta standar hidup yang diukur dengan PNB per kapita (Thomas, Vinod et.al: 2008).

Human Development Index (HDI) dapat mencerminkan bagaimana posisi sebuah negara dengan negara lain dalam tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu pembangunan manusianya termasuk di dalamnya pembangunan di bidang pendidikan sehingga analisis *Human Development Index (HDI)* dapat digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan pembangunan.

Dari uraian tersebut diatas diperlukan analisis *Human Development Index (HDI)* Indonesia melalui Pendidikan sebagai upaya dalam daya saing bangsa.

2. Tujuan Pembahasan

Dalam artikel ini ada beberapa hal yang dibahas yaitu: 1) Gambaran permasalahan pendidikan di Indonesia; 2) Permasalahan Pendidikan Dikaji dari Sudut Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Indonesia; 3) *Human Development Index (HDI)* Merupakan Salah Satu Indikator Pembangunan; 4) *Human Development*

Index (HDI) di Indonesia; dan 5) Pendidikan sebagai Investasi Pembangunan

B. PEMBAHASAN

1. Gambaran Permasalahan

Pendidikan di Indonesia

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UU No. 20 Tahun 2003). Secara umum, terdapat empat masalah pokok pendidikan nasional yang perlu diprioritaskan penanggulangannya (Ujiyanti, Tatak Prapti; 2009). Masalah yang dimaksud adalah; 1) Masalah pemerataan kesempatan dan akses pendidikan; 2) Masalah peningkatan mutu; 3) Masalah relevansi pendidikan; dan 4) Masalah Efisiensi dan sistem manajemen pendidikan. Secara lengkap empat permasalahan pokok tersebut dipaparkan sebagai berikut.

2. Pemerataan Kesempatan dan Akses Pendidikan

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai wahana untuk memajukan bangsa dan kebudayaan nasional, pendidikan nasional diharapkan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga Negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa

"Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu", dan pasal 11, ayat (1) yang menyatakan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi".

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pun mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Para pendiri bangsa meyakini bahwa peningkatan taraf pendidikan merupakan salah satu kunci utama mencapai tujuan negara yakni bukan saja mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menciptakan kesejahteraan umum dan melaksanakan ketertiban dunia.

Pemerataan pendidikan sendiri mencakup dua aspek penting yaitu aspek *equality* yaitu persamaan mengandung arti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan aspek *equity* yang bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. Selain itu, Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dengan mudah.

Masalah pemerataan pendidikan ini berkenaan dengan rasio atau perbandingan antara masukan pendidikan atau jumlah penduduk yang tertampung dalam satuan-satuan pendidikan, dengan jumlah penduduk yang secara potensial sudah siap memasuki satuan-satuan pendidikan. Makin besar kesenjangan antara jumlah penduduk

yang menjadi peserta didik dengan penduduk yang seharusnya memperoleh pendidikan, makin besar pula masalah pemerataan dan akses pendidikan tersebut. Permasalahan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: a) Kondisi sosial ekonomi keluarga; b) Kondisi fisik dan mental calon peserta didik; c) Kondisi tempat pendidikan yang tersedia; d) Tingkatan aspirasi masyarakat tentang peranan dan pentingnya pendidikan bagi kehidupan; dan e) Daerah jangkauan satuan pendidikan.

Hal ini kemudian menghadapkan pemerintah kepada tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak masyarakat memperoleh pendidikan, dalam hal ini melakukan pemerataan kesempatan dan akses pendidikan, salah satunya adalah kebijakan pembangunan pendidikan mengenai pemerataan dan perluasan akses pendidikan dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. Selain itu, ada pula kebijakan pemberian beasiswa kepada siswa tidak mampu dan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar. Tetapi kebijakan-kebijakan tersebut dipandang belum mampu mengatasi masalah pemerataan dan akses pendidikan di Indonesia.

3. Peningkatan Mutu

Sebagai komitmen terhadap mutu pendidikan, maka pemerintah merancang sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP). SPMP dituangkan dalam Permendiknas No. 63 tahun 2009. Dalam Permendiknas tersebut dinyatakan bahwa *"Penjaminan mutu adalah serangkaian proses dan sistem yang terkait untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data mutu*

tentang kinerja staf, program, dan lembaga". Terdapat beberapa penyebab mengapa mutu pendidikan di Indonesia, baik pendidikan formal maupun informal, dinilai rendah. Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah efektifitas, efisiensi dan standardisasi pengajaran.

1) Efektifitas Pendidikan di Indonesia

Pendidikan yang efektif adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan dan dapat tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, pendidik (dosen, guru, instruktur, dan trainer) dituntut untuk dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat berguna. Efektifitas pendidikan di Indonesia sangat rendah, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Hal ini menyebabkan peserta didik dan pendidik tidak tahu apa yang akan dihasilkan sehingga tidak mempunyai gambaran yang jelas dalam proses pendidikan.

2) Efisiensi Pengajaran di Indonesia

Efisien adalah bagaimana menghasilkan efektifitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih 'mudah'. Beberapa masalah efisiensi pengajaran di Indonesia adalah mahalnya biaya pendidikan, lamanya waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, mutu pegajar dan banyak hal lain yang menyebabkan kurang efisiennya proses pendidikan di Indonesia. Yang juga berpengaruh dalam peningkatan sumberdaya manusia Indonesia yang lebih baik.



3) *Standarisasi Pendidikan di Indonesia*

Dunia pendidikan terus berubah, kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat terus-menerus berubah apalagi di dalam dunia terbuka yaitu di dalam dunia modern dalam era globalisasi. Kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang dalam lembaga pendidikan haruslah memenuhi standar. Kualitas pendidikan diukur oleh standar dan kompetensi di dalam berbagai versi sehingga dibentuk badan-badan baru untuk melaksanakan standarisasi dan kompetensi tersebut seperti Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP). Tinjauan terhadap standarisasi dan kompetensi untuk meningkatkan mutu pendidikan akhirnya memunculkan bahaya yang tersembunyi yaitu kemungkinan adanya pendidikan yang terkekan oleh standar kompetensi saja sehingga kehilangan makna dan tujuan pendidikan tersebut.

4. **Relevansi pendidikan**

Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan *output* atau sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat secara langsung berguna dalam proses pembangunan. Lulusan pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam. Jika sistem pendidikan menghasilkan lulusan yang dapat mengisi semua sektor pembangunan baik yang aktual (yang tersedia) maupun yang potensial dengan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh lapangan kerja, maka relevansi dianggap tinggi.

Masalah relevansi ini terlihat dari banyaknya lulusan dari satuan pen-

didikan tertentu yang tidak siap secara kemampuan kognitif dan teknik untuk melanjutkan ke satuan pendidikan di atasnya. Masalah relevansi juga dapat diketahui dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu, yaitu sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi yang belum atau bahkan tidak siap untuk bekerja. Permasalahan relevansi pendidikan di Indonesia tersebut sedikit banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: 1) Perkembangan dan perubahan cepat yang tidak dapat diikuti oleh lembaga pendidikan; dan 2) Mutu dan perolehan tamatan yang dihasilkan sekolah tidak dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dunia kerja.

5. **Efisiensi dan Sistem Manajemen Pendidikan**

Manajemen pendidikan merupakan proses pengembangan kegiatan kerjasama kelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. (Alston, Philip. 2010). Masalah manajemen pendidikan berkaitan dengan bagaimana seharusnya sistem pendidikan diatur agar dapat menghasilkan *output* yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan, Masalah efisiensi pendidikan berkenaan dengan proses perubahan atau transformasi masukan produk (*raw input*) menjadi produk (*output*). Masalah efisiensi pendidikan tidak lepas dari masalah sistem manajemen pendidikan, sistem yang tidak sesuai dengan potensi seorang mahasiswa tentu akan menjadikan mahasiswa tersebut gagal menjadi sumber daya manusia yang dapat diandalkan dan pada akhirnya pendidikan tersebut menjadi tidak efisien. Masalah efisiensi pendidikan

dapat terjadi karena berbagai faktor, yaitu: 1) Tenaga kependidikan, terutama mutu tenaga pengajar; 2) Peserta didik; 3) Kurikulum; 4) Program belajar dan pembelajaran; dan 5) Sarana/prasarana pendidikan.

Dari permasalahan pendidikan yang diatas, tentu kita dapat melakukan strategi pemecahan dengan adanya partisipasi dari semua pihak, dalam hal ini adanya komitmen dari semua pihak terkait. Setelah semua pihak melaksanakan perannya dengan baik, solusi yang kedua adalah solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan guru sebagai tenaga kependidikan. Dan yang terakhir adalah menerapkan sistem pendidikan berbasis *life skill* dan pengembangan konsep *learn how to learn*, yang mencakup 4 (empat) dimensi, yaitu *learn to know*, *learn to be*, *learn to do*, dan *learn to life together*.

6. Permasalahan Pendidikan dikaji dari Sudut Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Indonesia

Human Development Index (HDI) yang telah digunakan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* dalam penyusunan laporan tahunan pembangunan manusia (*Human Development Report*) mulai berubah sejak tahun 2010. Seperti diketahui, *Human Development Index (HDI)* merupakan indeks komposit hasil agregasi tiga jenis indeks yang masing-masing mewakili dimensi pembangunan manusia (IPM), yakni indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup.

Perubahan mendasar dalam perhitungan *Human Development Index (HDI)* dengan metode baru mencakup penggunaan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) menggantikan indikator angka melek huruf (AMH) dalam perhitungan indeks pendidikan dan penggunaan indikator Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita menggantikan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita dalam perhitungan indeks standar hidup. Penggunaan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dalam perhitungan indeks pendidikan, misalnya menjadikan *Human Development Index (HDI)* dengan metode baru mampu memotret gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi dibanding *Human Development Index (HDI)* dengan metode lama. Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar *United Nations Development Programme (UNDP)* adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. selain Harapan Lama Sekolah (HLS) akan menjadi salah satu komponen pembentuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) ada juga indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) dikenal sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan terhadap akses layanan pendidikan di suatu wilayah baik Provinsi, Kabupaten atau Kota di Indonesia. Semakin tinggi nilai

APS, maka daerah tersebut dianggap berhasil menyelenggarakan layanan akses pendidikan. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur. Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk menngenyam pendidikan, sebab belum tentu siswa yang berada di daerah tersebut berasal dari daerah/wilayah sendiri, karena bisa saja siswa berasal dari daerah lainnya. Seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel Angka Partisipasi Sekolah 2011-2014

Provinsi	2011			2012			2013			2014						
	12/11	12/12	12/13	12/11	12/12	12/13	12/11	12/12	12/13	12/11	12/12	12/13				
ACEH	98,99	94,37	72,34	97,80	99,39	94,34	74,39	100,00	99,60	93,23	74,71	99,24	97,36	90,39		
DAERAH ISTERA	98,36	99	67,1	98,95	96,41	99,03	69,38	117,27	99,69	99,11	74,38	111,01	99,29	99,69	79,78	104,01
DAERAH BARAT	98,09	98,12	49,34	13,95	95,34	96,5	73,14	17,55	95,11	92,2	74,1	94,66	99,27	95,04	81,97	113,89
DAerah	97,99	98,28	65,41	15,34	98,19	98,01	69,39	15,81	98,59	98,39	89,79	110,04	94,87	94,36	79,3	114,01
JAWA	99,27	99,06	99,99	99,94	98,7	99,11	99,79	100,00	99,12	99,16	99,97	100,25	99,49	99,09	100,00	100,00
DAERAH SELATAN	97,95	98,49	12,73	99,12	99,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
KEPulauan	94,42	98,97	62,36	17,92	98,97	99,22	67,78	100,00	99,5	99,16	71,21	100,00	99,49	99,71	77,92	100,00
LAMPUNG	97,94	98,39	58,24	39,39	98,64	99	99,49	11,9	99,03	99,06	94,42	100,00	99,59	99,01	99,79	100,00
DIK. BANGSA BELITUNG	97,29	94,59	49,92	8,69	97,72	100,00	52,02	9,1	99,13	100,00	94,42	9,66	99,29	99,59	99,79	100,00
DIK. JAWA	97,94	99,57	69,17	9,67	98,64	99,99	79,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DIK. JAWA BARAT	98,14	99,16	59,72	17,93	99,04	94,07	61,07	100,00	99,4	99,47	99,99	100,00	99,47	99,69	79,29	112,92
JAWA BARAT	97,99	100,00	99,36	11,15	98,36	100,00	79,3	11,25	98,03	100,00	99,96	11,34	99,3	99,34	99,04	100,00
JAWA TIMUR	99,61	99,36	94,79	11,11	99,07	99,09	99,09	11,11	99,29	99,79	99,09	11,42	99,51	99,09	97,54	100,00
DIK. KALIMANTAN	99,49	97,94	79,4	94,27	99,79	99,36	100,00	100,00	99,99	99,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
JAWA TIMUR	98,23	99,47	59,01	15,56	98,28	99,1	59,8	15,97	98,4	99,12	62,09	100,00	99,59	99,36	79,25	114,01
DIK. NTB	98,27	99,11	59,34	12,89	98,69	100,00	61,07	14,59	99,03	99,03	62,02	100,00	99,29	99,07	99,25	100,00
NTB	99,39	99,36	69,22	10,99	99,19	99,04	71,44	10,99	99,29	99,9	74,09	100,00	99,29	97,29	81,59	100,00
DIK. TENGGAH BARAT	97,99	99,59	69,89	10,99	99,09	100,00	69,89	11,11	99,2	99,29	99,4	100,00	99,19	97,19	79,49	100,00
DIK. TENGGAH TIMUR	99,09	99,09	69,09	17,4	99,19	100,00	61,02	17,92	97,34	99,03	69,11	100,00	97,99	99,29	79,96	100,00
KALIMANTAN BARAT	99,29	99,94	59,17	11,94	99,99	100,00	59,19	14,27	99,94	100,00	59,19	100,00	99,19	99,19	99,04	100,00
KALIMANTAN TIMUR	99,12	99,59	59,79	10,99	99,62	100,00	59,99	10,99	99,59	99,54	59,19	100,00	99,49	99,94	69,04	100,00
KALIMANTAN SELATAN	99,79	97,94	59,39	10,99	97,94	100,00	100,00	100,00	99,29	99,16	99,99	100,00	99,29	99,09	97,19	100,00
KALIMANTAN TIMUR	98,42	99,4	69,1	10,99	99,12	99,12	71,79	10,99	99,49	99,49	71,92	100,00	99,59	97,89	69,5	114,01
KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAERAH UTARA	99,01	97,59	69,17	10,99	99,19	100,00	69,19	10,99	99,19	99,19	69,19	100,00	99,19	99,19	69,19	100,00
DAERAH TENGAH	97,9	99,19	59,19	10,99	99,19	100,00	69,19	10,99	99,19	99,19	69,19	100,00	99,19	99,19	69,19	100,00
DAERAH SELATAN	97,29	94,47	57,19	12,48	97,42	97,19	62,16	12,17	98,14	99,69	62,17	100,00	99,19	99,19	69,19	100,00
DAERAH TENGAH	97,94	99,09	62,19	12,48	97,19	100,00	62,16	12,17	98,14	99,69	62,17	100,00	99,19	99,19	69,19	100,00
KORUPAL	99,01	99,19	59,19	10,99	99,19	100,00	69,19	10,99	99,19	99,19	69,19	100,00	99,19	99,19	69,19	100,00
DAERAH BARAT	99,09	99,19	59,19	10,99	99,19	100,00	69,19	10,99	99,19	99,19	69,19	100,00	99,19	99,19	69,19	100,00
MALUKU	98,39	99,07	67,34	10,72	98,27	99,79	62,19	10,99	99,79	99,44	79,29	100,00	99,19	99,19	69,19	100,00
MALUKU UTARA	97,19	99,11	69,12	10,99	99,19	100,00	69,19	10,99	99,19	99,19	69,19	100,00	99,19	99,19	69,19	100,00
PAPUA BARAT	94,29	99,4	69,19	10,99	99,19	100,00	69,19	10,99	99,19	99,19	69,19	100,00	99,19	99,19	69,19	100,00
PAPUA	94,29	99,4	69,19	10,99	99,19	100,00	69,19	10,99	99,19	99,19	69,19	100,00	99,19	99,19	69,19	100,00
INDONESIA	97,42	97,99	57,95	14,42	98,42	100,00	69,19	10,99	99,19	99,19	69,19	100,00	99,19	99,19	69,19	100,00

Sumber: BPS-RI, Susenas 2011-2014

7. Human Development Index (HDI) Merupakan Salah Satu Indikator Pembangunan

The United Nations Development Program (UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai sebuah proses memperluas pilihan masyarakat. Yang paling penting adalah pilihan untuk berumur panjang dan sehat, mendapat

pendidikan yang cukup, dan menikmati standar kehidupan yang layak. The United Nations Development Program (UNDP) menyusun ukuran alternatif tingkat kesejahteraan dengan HDI (Human Development Index). Human Development Index (HDI) diukur dari beberapa aspek, yaitu: 1) Life expectancy at birth (harapan hidup saat lahir) aspek ini digunakan sebagai tolok ukur kualitas kesehatan; 2) Expected years of schooling (Harapan Lama Sekolah) aspek ini sebagai tolok ukur pendidikan; 3) Mean years of schooling (Rerata Partisipasi Sekolah) aspek ini sebagai tolok ukur pemerataan pendidikan; dan 4) Gross National Income (Pendapatan Nasional Bruto) aspek ini jelas mengukur tentang taraf ekonomi masyarakat.

Human Development Index (HDI) meringkas tiga variabel kesejahteraan dan meringkasnya dalam sebuah index dan variabel-variabel tersebut adalah:

- 1) Umur panjang (*longevity*), sebagai pengukur kesehatan dan nutrisi. Umur panjang diukur dengan rata-rata harapan hidup (dalam tahun) dari tingkat kelahiran, dihitung dengan mengasumsikan bahwa seorang bayi lahir dalam satu tahun tertentu akan mengalami tingkat kematian ketika dari tiap kelompok umur.
- 2) Pendidikan. Terdiri dari rata-rata terbobot antara (a) tingkat harapan lama sekolah dalam persentase. (b) rerata partisipasi sekolah.
- 3) Standar Hidup. Indikator standar kehidupan adalah GNI per kapita riil dalam dolar PPP (*Purchasing Power Parity*)



8. Human Development Index (HDI) di Indonesia

Human Development Index (HDI) dapat mencerminkan bagaimana posisi sebuah negara dengan negara lain dalam tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu pembangunan manusianya termasuk di dalamnya pembangunan di bidang pendidikan sehingga analisis *Human Development Index (HDI)* dapat digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan pembangunan. Nilai *Human Development Index (HDI)* Indonesia 2014 adalah 0.684 yang menempatkan pembangunan manusia Indonesia pada posisi 110 dari 188 negara di dunia. Antara tahun 1980 dan 2014, nilai *Human Development Index (HDI)* Indonesia meningkat 0,474-0,684, meningkat 44,3% atau peningkatan tahunan rata-rata sekitar 1,08%. Seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel HDI Indonesia

	Life expectancy at birth	Expected years of schooling	Mean years of schooling	GNI per capita (2011 PPP\$)	HDI value
1980	59.6	8.7	3.1	2,901	0.474
1985	61.6	9.9	3.5	3,431	0.512
1990	63.3	10.2	3.3	4,337	0.531
1995	65.0	10.2	4.2	5,930	0.566
2000	66.3	10.7	6.7	5,308	0.606
2005	67.2	11.2	7.4	6,547	0.635
2010	68.1	12.5	7.4	8,267	0.665
2011	68.3	12.7	7.5	8,642	0.671
2012	68.5	13.0	7.6	9,060	0.678
2013	68.7	13.0	7.6	9,446	0.681
2014	68.9	13.0	7.6	9,786	0.684

Sumber: Human Development Report 2015

Berdasarkan Tabel diatas kemajuan Indonesia dalam setiap indikator *Human Development Index (HDI)* , antara tahun 1980 dan 2014, harapan hidup di Indonesia saat lahir meningkat 9,3 per tahun, tahun rata-rata sekolah meningkat 4,5 per tahun dan tahun persekolahan meningkat 4,3 per tahun diharapkan sedangkan GNI per kapita Indonesia meningkat sekitar 237,4 persen antara

tahun 1980 dan 2014.

9. Pendidikan sebagai Investasi Pembangunan

Pendidikan adalah merupakan investasi pembangunan, untuk itu Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, melalui berbagai kebijakan-kebijakan pendidikan termasuk kebijakan tentang wajib belajar, peningkatan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN atau APBD, dan kebijakan lain yang hal tersebut merupakan cerminan kesadaran pemerintah tentang pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang.

Pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Pada praktek manajemen pendidikan modern, salah satu fungsi pendidikan adalah fungsi teknis-ekonomis baik pada tataran individual hingga tataran global. Fungsi teknis ekonomis merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Misalnya pendidikan dapat membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetisi dalam ekonomi yang kompetitif.

Secara umum terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang maka tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas seseorang tersebut dikarenakan dimilikinya keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan. Para penganut teori *Human Capital* berpendapat bahwa pendidikan

adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi manfaat moneter ataupun non-moneter. Manfaat non-moneter dari pendidikan adalah diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, kepuasan kerja, efisiensi konsumsi, kepuasan menikmati masa pensiun dan manfaat hidup yang lebih lama karena peningkatan gizi dan kesehatan.

Manfaat moneter adalah manfaat ekonomis yaitu berupa tambahan pendapatan seseorang yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan dibawahnya. (Walter W. McMahon dan Terry G. Geske, 2010).

Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Semakin banyak orang yang berpendidikan maka semakin mudah bagi suatu negara untuk membangun bangsanya. Investasi pendidikan memberikan nilai balik (*rate of return*) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang lulus dan memasuki dunia kerja.

C. PENUTUP

Dari pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia; 2) Permasalahan pendidikan merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan luas sehingga penanganan

masalah pendidikan menyangkut banyak komponen dan melibatkan banyak pihak; 3) *Human Development Index* (HDI) adalah merupakan salah satu indikator dalam pembangunan yang dapat digunakan untuk menganalisis perbandingan status pembangunan sosial ekonomi suatu negara dan sekaligus menggambarkan pembangunan manusia di suatu Negara; 4) Dengan informasi angka dan peringkat HDI (*Human Development Index*) dapat diperoleh gambaran keadaan kesejahteraan masyarakat yang diukur diukur dari beberapa aspek, yaitu: a) *Life expectancy at birth* (harapan hidup saat lahir) aspek ini digunakan sebagai tolok ukur kualitas kesehatan; b) *Expected years of schooling* (Harapan Lama Sekolah) aspek ini sebagai tolok ukur pendidikan; c) *Mean years of schooling* (Rerata Partisipasi Sekolah) aspek ini sebagai tolok ukur pemerataan pendidikan; dan d) *Gross National Income* (Pendapatan Nasional Bruto) aspek ini jelas mengukur tentang taraf ekonomi masyarakat; 5) *Human Development Index* (HDI) dapat mencerminkan bagaimana posisi sebuah negara dengan negara lain dalam tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu pembangunan manusianya termasuk di dalamnya pembangunan di bidang pendidikan; 6) Nilai *Human Development Index* (HDI) Indonesia 2014 adalah 0.684 yang menempatkan pembangunan manusia Indonesia pada posisi 110 dari 188 negara di dunia. Antara tahun 1980 dan 2014, nilai *Human Development Index* (HDI) Indonesia meningkat 0,474-0,684, meningkat 44,3% atau peningkatan tahunan rata-rata sekitar 1,08%; dan 7) Menurut teori *Human*

Capital berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi manfaat moneter ataupun non-moneter.

SUSENAS. <http://www.bps.go.id/>. diakses 7 Oktober 2016; 13.20 WIB
UNDP. United National Development Program. *Human Development Report 2015* <http://www.undp.org/>. diakses 5 Oktober 2016: 17.05 WIB

DAFTAR PUSTAKA

_____ Pembukaan
UUD Republik Indonesia Tahun
1945

_____ Permendiknas
No. 63 tahun 2009

_____ UU No. 20
Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional Indonesia.
2003

Alston, Philip. 2010, *A Human Rights Perspective on the Millennium Development Goals*, Contributed paper to the work of the Millennium Project Task Force on Poverty and Economic Development, New York.

Soubbotina, Tatyana P. 2000. *Beyond Economic Growth: An Introduction to Sustainable Development*. World Bank

Thomas, Vinod et.al. 2008. *The Quality of Growth*. World Bank.

Ujiyanti, Tatak Prapti. 2009. *Reformasi Pendidikan Dasar di Indonesia*. Policy Assessment, The Indonesian Institute.

Walter W. McMahon dan Terry G. Geske, *Financing Education: Overcoming Inefficiency and Inequity*, USA: University of Illionis, 2010, h.121

Laman

Angka Partisipasi Sekolah menurut Golongan Pendapatan,, http://kfm.depsos.go.id/mod.php?mod=userpage&page_id=16 diakses 7 Oktober 2016; 21.45 WIB

Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada Berbagai Jenjang Pendidikan tahun 2011-2014, <http://www.bps.go.id/sector/socwel/index.html>. 10 Oktober 2016; 17.29 WIB

BPS: Badan Pusat Statistik. 2015.

